

# **EVALUASI KEBIJAKAN STUNTING DI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN REMBANG**

Penulis : Anita Eka Mawarni, Dr. Drs. Slamet Santoso, M.Si, Dr. Dra. Triyuningsih, M.Si

[@anitaeka374@gmail.com](mailto:@anitaeka374@gmail.com)

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

## ***Abstract***

*The improvement of human resource quality in Indonesia is hindered, in part, by stunting a nutritional issue. As outlined in the Government Work Plan, stunting reduction has been designated as a national priority. An approach employed by the Rembang Regency Social Service for Women's Empowerment and Family Planning to mitigate stunting is the adoption of the 8 Convergence Actions to Accelerate Stunting Prevention. Analysis of the inputs, processes, and outcomes of stunting reduction policies constitutes the objective of this study. With a descriptive research design, this study employs a qualitative methodology*

*Based on the research results, it was found that the implementation of the Policy Evaluation carried out in Rembang Regency was not implemented optimally because there was the limited level of community engagement in participating in the activities indicates that mothers of infants continue to lack awareness and comprehension of the significance of establishing good and correct parenting patterns provided to prevent early birth of stunted babies.*

***Keywords: Evaluation, Policy, Stunting***

## ***Abstrak***

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia terhambat, salah satunya, oleh masalah gizi stunting. Sebagaimana diuraikan dalam Rencana Kerja Pemerintah, pengurangan stunting telah ditetapkan sebagai prioritas nasional. Pendekatan yang digunakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang untuk mengurangi stunting adalah dengan mengadopsi 8 Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting. Analisis terhadap input, proses, dan hasil dari kebijakan penurunan stunting merupakan tujuan dari penelitian ini. Dengan desain penelitian deskriptif, studi ini menggunakan metodologi kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan Evaluasi Kebijakan yang dilakukan di Kabupaten Rembang belum terlaksana secara optimal karena masih rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang mengindikasikan masih kurangnya kesadaran dan pemahaman para ibu yang memiliki balita akan pentingnya pembentukan pola pengasuhan anak yang baik dan benar yang diberikan untuk mencegah terjadinya bayi stunting sejak dini.

***Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Stunting***



Rembang masih tergolong tinggi dibandingkan dengan wilayah disekitarnya seperti Kabupaten Blora dan Kabupaten Pati. Bagi pemerintah pusat dan daerah, salah satu tantangan utama yang terus mereka hadapi ialah penerapan langkah-langkah pencegahan stunting yang relevan. Diantaranya ialah rendahnya koordinasi antar OPD (Yusran dkk., 2021), tantangan terkait penerapan konvergensi regional dalam pencegahan stunting (Iqbal dan Yusran, 2021) dan serangkaian skenario yang menunjukkan korelasi signifikan dalam perubahan kebijakan yang berdampak pada ketidakseimbangan hubungan fungsional antara kebijakan pangan, ekosistem alam, dan prevalensi stunting. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mempertimbangkan fakta bahwa masih terdapat kesulitan dalam menerapkan sistem pemantauan untuk menghindari stunting.

Angka stunting di Kabupaten Rembang masih tinggi, bahkan melebihi angka kasus di beberapa daerah. Banyak permasalahan yang dihadapi dalam penanganan tingkat kecamatan mulai sumber daya manusia, pola hidup, dan kurangnya koordinasi antara lintas sektor yang ada dalam penanganan penurunan angka stunting. Masih sulitnya masyarakat menyadari bahwa beberapa pola hidup yang mereka jalani dapat meningkatkan risiko

bayi terlahir dengan kondisi stunting, seperti kurangnya perhatian pemerintah pada ibu yang beresiko, merokok, tidak memeriksakan kehamilannya, dan tidak makan makanan yang bergizi.

Kabupaten Rembang menjadi Kabupaten lokus stunting di Jawa Tengah Pada Tahun 2020 dengan jumlah 17,67% bayi yang lahir stunting dan bertambah pada tiga tahun terakhir. Selain itu fasilitas kesehatan yang belum dimanfaatkan dengan baik dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kembang tumbuh janin yang dikandung. Menindaklanjuti tingginya angka stunting di Kabupaten Rembang, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang mengembangkan pendekatan inovatif untuk menurunkan stunting. Inisiatif pemerintah tidak dilaksanakan dengan cara terbaik bagi masyarakat peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Program Stunting di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang”. Peneliti melaksanakan penelitian yang bersifat analisis.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penelitian kualitatif dengan menggunakan metodologi deskriptif ialah metodologi

yang dipergunakan. Dengan mempergunakan solusi terhadap isu-isu yang dibahas, pendekatan ini menggambarkan dan mendiskusikan kejadian atau isu terkini. Menurut Denzim dan Lincoln dalam Moleong (2006), penelitian kualitatif ialah setiap penelitian yang mengacu pada landasan ilmiah, melaksanakan banyak metodologi terkini, dan mencoba memahami suatu fenomena yang terjadi. Upaya yang dilakukan untuk mengkarakterisasi suatu fenomena sosial yang ada di publik melalui penelitian deskriptif kualitatif ini. Dampak implementasi kebijakan terhadap pencegahan stunting sedang diteliti di Kabupaten Rembang. *Purposive sampling* merupakan metode yang dipergunakan dalam riset ini untuk memilih informan.

Kelompok peserta yang berpengetahuan diambil dari mereka yang benar-benar memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Informasi penelitian ini diberikan oleh Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Rembang, Dinas Pengendalian Penduduk, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, dan Pemberdayaan Wanita Keluarga Berencana. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan beberapa metode pengumpulan data yang dipergunakan. Untuk mengetahui kebenaran data peneliti mempergunakan teknik triangulasi dan

referensi jelas. Selanjutnya dilakukan reduksi data, visualisasi data, validasi data, dan penarikan kesimpulan disertai konfirmasi untuk menguji data yang diperoleh.

### **Hasil dan Pembahasan**

Penilaian terhadap pelaksanaan Kebijakan Program Stunting di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang akan dibahas pada bab ini berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh dari tanggapan informan lapangan.

Penelitian dikaji dengan mempergunakan tiga indikator evaluasi menurut William Dunn (Subarsono, 2013 :126) yakni Efektivitas, Responsivitas dan Ketepatan dari Pelaksanaan Evaluasi Program Stunting di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.

Metode penyajian data deskriptif kualitatif dipergunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan fenomena di lapangan. Dengan mempergunakan wawancara, observasi langsung, dan pencatatan peristiwa yang terjadi, tim peneliti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Informan yang dianggap mampu memberikan data yang relevan dengan penelitian ialah subjek wawancara terstruktur yang dilakukan dengan mempergunakan pedoman wawancara yang terdiri dari serangkaian pertanyaan.

Data yang diperoleh kemudian akan dijabarkan sesuai dengan indikator yang dipergunakan peneliti untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan program stunting di Kabupaten Rembang.

## **1. Mengevaluasi kebijakan stunting di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang**

### **1.1 Efektivitas**

Dalam Perbup Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penurunan Stunting di Kabupaten Rembang Pasal 2 tentang maksud dan tujuan yang harus dicapai dalam pembuatan kebijakan ini. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mencegah dan menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Rembang. Menurut kepala bidang Dalduk KB dan KS Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang, pihaknya sudah berupaya untuk membuat kebijakan serta kegiatan yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari kelahiran bayi stunting yang dimana penyebabnya terkadang tidak diketahui dan dianggap remeh oleh sebagian orang.

Pencapaian tujuan terwujudnya Kabupaten Rembang yang bebas stunting sedang diusahakan dengan berbagai kebijakan yang dibuat, penyuluhan kepada keluarga yang beresiko hingga pelatihan terhadap keluarga yang memiliki bayi stunting agar kedepannya masyarakat lebih

peka dan bisa antisipasi bahwa hal ini dapat dicegah. Pendekatan secara personal dan kelompok dipergunakan agar dapat memaksimalkan program yang sedang dijalankan. Dukungan dari masyarakat juga perlu dikerahkan agar tidak ada lagi penolakan yang terjadi, pemerintah juga memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk membuat strategi dan inovasi baru agar tujuan dari program dapat dicapai. Strategi ini dipergunakan di sini dalam upaya untuk mengatasi dan mengatasi hambatan dari berbagai situasi kehidupan. Rencana, rencana, dan tujuan sering kali dihubungkan dengan strategi.

Menurut Sandra Fikawati,dkk (2017), peran pemerintah dalam pencegahan stunting ini diperlukan, bentuk edukasi dan pertolongan berupa bantuan pangan bagi masyarakat yang kekurangan bisa jadi dilakukan jika sudah tidak dapat dicegah kembali jika ingin mewujudkan suatu wilayah yang memiliki SDM (Sumber daya manusia) sangat baik dan bebas dari bayi baru lahir yang stunting. Menurut kajian penulis, Evaluasi Program Stunting di Kabupaten Rembang belum mampu memberantas stunting di wilayah tersebut secara tuntas. Hal ini disebabkan oleh masih ditemukannya kelahiran stunting di Kabupaten Rembang, meskipun hal ini sudah diantisipasi dengan berbagai program kegiatan yang dibuat oleh pemerintah.

Strategi khusus harus didesain dalam suatu pemerintahan untuk merealisasikan tujuan organisasi ini sejalan dengan rencana yang harus disusun oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang agar dapat segera menyusun strategi baru yang tepat sasaran. Tujuan yang ada merupakan prasyarat yang diperlukan di masa depan. Komitmen dan visi pimpinan juga perlu diperhatikan agar tidak tumpang tindih dengan kepentingan yang lainnya.

Pencapaian tujuan perlindungan dan edukasi kepada masyarakat yang terdampak maupun yang beresiko tinggi. Tujuan diadakannya sarana dan prasarana yang mendukung program ini melalui edukasi secara berkala dan terus menerus agar dapat mengurangi dan meminimalisir bayi yang terlahir stunting sering mengalami kendala, mulai dari SDM yang kurang akal iterasi mengenai kesehatan ibu hamil dan permasalahannya lainnya yang bersumber dari internal dari mereka masing-masing.

Penentu keefektifan ialah terciptanya program stunting Kabupaten Rembang yang meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hidup sehat. Hasil penelitian penulis mengungkapkan bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat, khususnya mengenai faktor-faktor yang berkontribusi

terhadap terjadinya stunting. Hal ini dibuktikan dengan masih dijumpai masyarakat yang merokok secara sembarangan bahkan dekat dengan ibu hamil yang menjadi salah satu penyebab bayi terlahir stunting. Kesadaran masyarakat akan hal ini sangat minim dan tidak banyak yang mengetahui bahwa banyak hal yang perlu diperhatikan ketika orang mengandung, keluarga mengambil peran penting dalam edukasi ini karena jika sewaktu-waktu sang ibu lupa atau tidak mau keluarga lah yang menjadi penyemangan dan pendorong bagi sang ibu untuk terus memperhatikan kesehatan janin yang dikandungnya.

Menurut Sandra Fikawati (2017), beberapa penyebab, antara lain berat badan lahir rendah, pola asuh dan stimulasi anak yang tidak tepat, asupan makanan yang tidak mencukupi, penyakit yang berulang, dan variabel lainnya, dapat menyebabkan terjadinya stunting. Ibu hamil wajib memeriksakan kandungannya paling minimal satu kali dalam satu bulan yang dapat dilaksanakan di fasilitas kesehatan setempat, beberapa kemungkinan dapat terjadi jika ibu tidak memeriksakan kesehatan bayi yang dikandungnya. Selain itu, penulis juga masih menjumpai keluarga yang tidak memiliki jamban dan membuang air besar di sungai, laut, hingga hutan. Pencapaian tujuan ini terkendala oleh faktor sikap masyarakat yang tidak peduli

dengan sesama, bahkan ibu hamil sekalipun, mereka masih merasa bahwa hal yang dilakukan tidak berbahaya. Sehingga, para ibu hamil risiko tinggi stunting tetap melaksanakan kebiasaan yang tidak baik.

Dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak dapat disebabkan oleh stunting. Penyebab jangka pendeknya antara lain buruknya metabolisme tubuh, gangguan pertumbuhan fisik, gangguan perkembangan mental, dan gangguan kecerdasan. Namun, dalam jangka panjang, hal ini berkaitan dengan perkembangan otak dan pikiran. Kelainan yang terjadi selama masa bayi dan remaja dapat menyebabkan keterlambatan dalam menyelesaikan sekolah, rendahnya hasil fisik, dan tenaga kerja di bawah standar yang dapat menghambat kemajuan ekonomi. Menurut statistik UNICEF, anak-anak yang lahir dengan stunting seringkali memiliki IQ 11 poin lebih rendah dibandingkan anak-anak yang lahir normal. Selain itu, jika pemerintah tidak mengatasi masalah ini secara efektif, hal ini akan menyebabkan permasalahan yang lebih serius, yaitu Indonesia akan *lost generation*.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan melalui hasil wawancara dengan informan terkait pencapaian tujuan dari pelaksanaan Kebijakan Program Stunting di Kabupaten Rembang dapat disimpulkan

bahwa kegiatan atau kebiasaan ibu hamil yang buruk dapat menjadi penyebab bayi terlahirnya stunting dan ditambah dengan lingkungan yang tidak sehat. Upaya perlindungan dan pencegahan terhadap masyarakat dari lahirnya bayi stunting melalui informasi dan pengetahuan kepada masyarakat. Bantuan pemeriksaan gratis dan bahan makanan sudah dilaksanakan meskipun demikian masih terdapat beberapa masyarakat yang menghiraukan informasi yang disampaikan.

## **1.2 Responsivitas**

Menurut Dunn (Subarsono, 2013:126) menjelaskan bahwa daya tanggap ialah sejauh mana suatu kebijakan dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan, kepentingan, atau cita-cita kelompok masyarakat tertentu. Sejahtera mana pemerintah memenuhi tuntutan kelompok sasaran kebijakan merupakan indikator lain dari daya tanggap pemerintah. Indikator responsivitas menjadi sangat penting karena pada proses inilah sebuah pelaksanaan kebijakan memperoleh masukan, tanggapan dan pendapat dari kelompok sasaran

Dalam penelitian ini, sasaran dari pelaksanaan Kebijakan Program Stunting di Kabupaten Rembang meliputi Ibu hamil dan ibu risiko tinggi yang berpotensi untuk melahirkan bayi stunting di Kabupaten Rembang. Penerimaan dan dukungan kelompok sasaran terhadap Kebijakan

Program Stunting di Kabupaten Rembang masih beragam, diantaranya terdapat perbedaan tanggapan dari ibu hamil dan risiko tinggi.

Kebijakan responsivitas ialah kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan, keyakinan, atau tuntutan kelompok sosial tertentu. Selain itu responsivitas juga dimanfaatkan guna melihat daya tangkap pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendapatkan sasaran kebijakan. Artinya seberapa berpengaruh pelaksanaan Kebijakan Program Stunting ini dapat memuaskan kelompok sasaran.

Menindaklanjuti Peraturan Bupati No. 52 tahun 2020 tentang penurunan stunting di Kabupaten Rembang terdapat beberapa program yang diantaranya ialah memberikan sosialisasi dan pendampingan secara pribadi maupun kelompok. Pembuatan rancangan Peraturan Bupati yang sudah di sah kan tetapi masih terdapat hambatan dalam keberjalanan program.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah menyatakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang telah berupaya meningkatkan kinerjanya melalui kebijakan yang dikembangkannya. Namun, kendala yang ditemui ketika dilaopangan ialah luasnya wilayah yang tidak bisa dicakup oleh pekerja mereka, selain itu juga

terdapat pengawasan yang dilakukan oleh staf yang berada pada tingkat Kecamatan agar langsung dapat berhubungan dengan sasaran yang dituju.

### **1.3 Kecukupan**

Penanggulangan stunting di Kabupaten Rembang menghadapi berbagai kendala dalam mencapai tujuan evaluasi kebijakan. Kepala DINSOSPPKB Kabupaten Rembang menyoroti bahwa masalah utama yang sering dihadapi adalah ketidakakuratan data.

Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Rembang meliputi ketidakakuratan dan ketidaksesuaian data, minimnya sumber daya manusia dan teknologi informasi, kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur dan fasilitas. Semua ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi, komunikasi, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan evaluasi kebijakan yang efektif dan efisien.

Implementasi kebijakan yang adil dan merata di Kabupaten Rembang memerlukan koordinasi yang lebih baik antar lembaga, penyesuaian berdasarkan data statistik yang akurat, dan peningkatan akses ke wilayah terpencil. Tantangan geografis, kurangnya sumber daya, dan masalah logistik perlu diatasi melalui

kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, LSM, dan masyarakat setempat. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan partisipatif, diharapkan distribusi kebijakan dapat lebih efektif dan merata, sehingga setiap daerah dapat merasakan manfaat dari program penanggulangan stunting.

Secara keseluruhan, meskipun ada upaya signifikan untuk meningkatkan sumber daya, prasarana, dan sarana di Kabupaten Rembang, tantangan tetap ada, terutama di daerah terpencil. Keterbatasan alat medis, kurangnya tenaga kesehatan, masalah logistik, dan infrastruktur yang buruk menjadi kendala utama. Koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat setempat, serta peningkatan anggaran dan pelatihan, diperlukan untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan stunting dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah.

#### **1.4 Ketepatan**

Menurut Dunn (2003:438), alasan substantif dan kebenaran sangat terkait karena permasalahan kebijakan berhubungan dengan beberapa kriteria, bukan kriteria tunggal. Nilai atau biaya tujuan kebijakan serta keandalan asumsi yang mendasarinya disebut sebagai kesesuaian. Ketika membuat keputusan yang masuk akal, rasionalitas substantif ditunjukkan. Hal ini melibatkan

pertimbangan berbagai aspek kelayakan teknologi, ekonomi, politik, dan administratif untuk menentukan pilihan mana yang paling praktis mengingat keadaan yang ada.

Kelayakan teknis mengacu pada seberapa baik tindakan yang dipilih mampu mengatasi permasalahan yang berkembang di Kabupaten Rembang terkait pelaksanaan Kebijakan Stunting yaitu ibu hamil dan ibu yang beresiko stunting yang belum terpapar informasi mengenai bagaimana cara untuk menjaga kandungan hingga melahirkan.

Respon Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang sebagai penanggung jawab masih berusaha untuk membentuk tim khusus yang nantinya ditugaskan khusus untuk menangani stunting. Belum adanya regulasi atau peraturan yang diberikan kepada masyarakat mengenai ibu hamil dengan risiko tinggi yang disebabkan oleh lingkungan mereka juga menjadi salah satu penyebab sulitnya mengubah kebiasaan buruk yang mereka lakukan. Hal ini yang menjadi alasan bagi mereka ketika bayi yang telah lahir stunting, mereka merasa sudah melaksanakan hal yang baik tetapi dalam kenyataannya hal tersebut malah membahayakan. Sumber informasi yang dapat mereka akses ialah kebijakan program stunting yang telah dilaksanakan oleh OPD terkait dan LSM pendamping lainnya, walaupun masih terdapat beberapa

kekurangan dalam melaksanakan program tetapi dengan bantuan LSM serta organisasi sedikit banyak membantu berjalannya program. Hal ini juga disebabkan oleh belum adanya komunikasi antar organisasi atau instansi terkait dengan pelaksana kebijakan terkait mengenai program yang harus dijalankan.

Dalam Perbup Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penurunan Stunting di Kabupaten Rembang Pasal 16 mengenai pengorganisasian disebutkan bahwa keanggotaan tim koordinasi dan tim kelompok kerja terdiri dari pokja kesehatan, pokja ketahanan pangan, pokja pemukiman dan air bersih, dan pokja komunikasi edukasi dan informasi yang saling berkolaborasi dalam menjalankan program. Kurangnya komunikasi antar tim penegak Perbup dengan organisasi dan instansi dalam penyediaan akses informasi bagi ibu hamil agar tidak terdapat lagi kelahiran stunting baru di masyarakat belum terpenuhi dengan baik.

Hal ini juga kemudian menyebabkan terhambatnya pemenuhan kelayakan hidup dan kelayakan teknis yang berhubungan dengan apakah kebijakan program stunting terlaksana dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Dengan kolaborasi antara lintas sektor yang memiliki kepentingan organisasi atau kelompok terkadang juga menjadi salah satu hambatan teknis dimana mereka

memiliki data berbeda dan penanganan yang berbeda juga.

Menurut Trihoko (2015). Suatu kelayakan politik dapat dilihat dari kebijakan yang diambil dalam mengatasi persoalan yang terjadi didalam masyarakat. Pembuatan kebijakan yang belum tepat sasaran juga menjadi penghambat secara kelayakan politik. Kelayakan politik yang berhubungan dengan kebijakan program stunting di Kabupaten Rembang dapat diterima oleh aktor publik dan masyarakat. Salah satu pelaku politik yang sudah baik Perda Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penurunan Stunting di Kabupaten Rembang ialah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang. Peraturan tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga terjadi tumpang tindih antara pemenuhan kebutuhan individu yang berisiko mengalami stunting dan yang tidak. Namun, belum terlaksananya program dengan baik mengakibatkan regulasi Prbup ini masih perlu dievaluasi kembali agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Koordinasi antar instansi dan kelompok di Kabupaten Rembang menjadi salah satu cara untuk mengatasi permasalahan dalam menyediakan pelayanan yang baik pada masyarakat guna terwujudnya Program Stunting di Kabupaten Rembang. Komitmen bersama dapat menjadikan dorongan agar setiap

kendala dan permasalahan yang terjadi dapat ditangani dengan baik dan sesuai dengan prosedur.

Peningkatan fungsi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Rembang telah melibatkan berbagai upaya strategis termasuk pelatihan, evaluasi berkala, penggunaan teknologi, dan sosialisasi yang intensif. Kolaborasi dengan kader posyandu, umpan balik dari lapangan, dan keterlibatan masyarakat juga memainkan peran penting dalam memperbaiki dan mengoptimalkan kebijakan ini. Hasilnya adalah peningkatan partisipasi masyarakat, penurunan angka stunting, dan perbaikan umum dalam kesehatan ibu dan anak di wilayah tersebut.

## **2.Faktor yang Menjadi Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Stunting di Kabupaten Rembang**

### **2.1 Sikap dan Kecenderungan**

Berhasil tidaknya implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh sikap menerima atau menolak. Hal ini sangat mungkin terjadi karena peraturan yang ada tidak dikembangkan oleh masyarakat setempat yang memahami permasalahan dan kesulitan yang mereka hadapi.

Sikap dan penerimaan dari keluarga beresiko stunting di Kabupaten Rembang masih menjadi kendala dalam pengoptimalan pelaksanaan Kebijakan Program Stunting di Kabupaten Rembang.

sikap kecenderungan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Program Stunting menjadi penghambat keberhasilan kebijakan ini. Masyarakat yang tidak menganut program yang diberikan untuk menjaga kembang tumbuh janin yang dikandung hingga melahirkan, padahal kebijakan ini sudah diatur dalam Perbup yang tertuang didalamnya mengenai mekanisme pelaksanaan program stunting di Kabupaten Rembang.

### **2.2 Sumber Daya Keberhasilan**

Salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya keberhasilan adalah pada bidang ketahanan pangan. Keterlambatan penanganan dan kebijakan guna penurunan angka stunting di Kabupaten Rembang telah menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak yang terlibat. Kepala DINSOSPPKB Kabupaten Rembang menyatakan keprihatinannya terhadap keterlambatan ini, mengidentifikasi beberapa faktor penyebabnya, termasuk kurangnya kerja sama antar instansi.

Selain itu berbagai pihak di Kabupaten Rembang berupaya untuk mengatasi masalah kurangnya suplai bahan pangan dengan meningkatkan kerja sama antar berbagai sektor, memperbaiki distribusi makanan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, dan mengembangkan program ketahanan pangan. Upaya-upaya ini

diharapkan dapat membantu memastikan bahwa setiap keluarga memiliki akses yang cukup terhadap makanan bergizi, sehingga dapat meminimalisir perkembangan stunting di daerah tersebut.

### **2.3 Pola Komunikasi Yang Tidak Terarah Dan Satu Pintu**

Upaya untuk memperbaiki pola komunikasi dalam penanganan ibu berisiko tinggi stunting melibatkan peningkatan koordinasi antar berbagai pihak, penggunaan teknologi untuk mengoptimalkan aliran informasi, serta pelatihan komunikasi yang baik bagi petugas lapangan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi birokrasi, mempercepat penerimaan dan tindak lanjut informasi, serta memastikan bahwa semua ibu yang berisiko tinggi mendapatkan penanganan yang cepat dan efektif. Dengan sistem komunikasi yang lebih terarah dan terpadu, penanganan stunting di Kabupaten Rembang dapat dilakukan dengan lebih efisien dan tepat waktu.

Salah satu alat yang efektif untuk melaksanakan kebijakan publik ialah koordinasi. Kesalahan dalam suatu proses implementasi diasumsikan akan sangat jarang terjadi jika koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat semakin baik dan sebaliknya.

Meski menghadapi banyak tantangan, program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana Kabupaten Rembang berupaya memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat melalui berbagai media. Dengan memanfaatkan berbagai media, mereka memperluas target audiensnya dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan bantuan langsung—yang semuanya memerlukan komunikasi dan tindakan yang terampil dan terdidik. Penurunan angka kejadian stunting di Kabupaten Rembang merupakan hasil dari rencana komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Selain melibatkan masyarakat secara aktif dan membina kolaborasi antar pihak dan pemangku kepentingan terkait, upaya ini juga berfokus pada sosialisasi. Diyakini bahwa dengan secara konsisten meningkatkan teknik komunikasi, kita akan mampu menurunkan angka kelahiran baru akibat stunting dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak dalam jangka panjang.

Komunikasi tim yang tidak memadai dapat berdampak signifikan terhadap informasi yang diperoleh oleh sasaran, khususnya dalam konteks penanganan stunting. Kepala DINSOSPPKB Kabupaten Rembang mengakui bahwa komunikasi tim yang kurang maksimal sering kali menjadi penyebab terhambatnya informasi yang diterima oleh sasaran.

## **2.4 Struktur Birokrasi Dalam Penanganan Yang Belum Jelas**

Struktur birokrasi yang belum jelas menjadi salah satu tantangan besar dalam penanganan stunting di Kabupaten Rembang. Kepala DINSOSPPKB Kabupaten Rembang mengakui bahwa. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memperbaiki birokrasi agar lebih efektif.

Berbagai pihak di Kabupaten Rembang menyadari bahwa struktur birokrasi yang tidak jelas dan kompleks merupakan hambatan utama dalam penanganan stunting. Upaya untuk menyederhanakan alur birokrasi, menyusun SOP yang jelas, memberikan pelatihan kepada petugas, serta mengembangkan sistem manajemen yang terstruktur, semuanya bertujuan untuk mempercepat dan memperbaiki proses penanganan stunting. Dengan demikian, diharapkan setiap langkah penanganan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, serta masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan bantuan yang mereka perlukan.

Kurangnya ketegasan pemerintah dalam melaksanakan keputusan yang diatur dalam Perbub No.52 Tahun 2020 mengenai Penurunan angka stunting di Kabupaten Rembang menjadikan kebijakan yang sudah dibentuk dan dilaksanakn kurang optimal. Evaluasi kebijakan yang

mengambil dari beberapa faktor atau indikator berhasilnya suatu kegiatan menurut George C. Edwards III seperti Komunikasi, sumber daya manusia, sikap dan perilaku, seerta struktur birokrasi sebagai fokus pelaksanaan kegiatan. Hal ini didasarkan pada fokus yang akan diteliti untuk mendukung Evaluasi kebijakan stunting di Kabupaten Rembang. Terdapat 4 faktor penghambat yang menjadi penyebab utama tidak tercapainya penurunan angka kelahiran baru stunting di Kabupaten Rembang. Dari berbagai aspek faktor penghambat Evaluasi Kebijakan program stunting di Kabupaten Rembang disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya penegakan Peraturan Bupati secara tegas, ketika angka kelahiran bayi stunting di Kabupaten Rembang masih tinggi seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengambil tindakan tegas dan segera mengevaluasi kebijakan yang diambil agar cepat dalam mendapatkan penanganan yang tepat

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian penulis membuktikan bahwa program stunting di Kabupaten Rembang masih di bawah standar. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kelahiran baru akibat stunting di Kabupaten Rembang. Dari beberapa kondisi yang terjadi terdapat kebiakan yang sudah

terlaksana dengan baik dan kebijakan yang belum berjalan secara maksimal.

- a. Beberapa kondisi setelah dievaluasi program stunting di Kabupaten Rembang yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat akan penyebab dan dampak dari stunting dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat serta menambah pengetahuan bagi mereka. Selain itu, pelaksanaan pendampingan secara kelompok maupun personal lebih dapat diterima dan meningkatkan pemahaman agar mereka lebih waspada dan lebih peduli. Memberikan edukasi dan sosialisasi secara langsung.
- b. Pelaksanaan kebijakan Program Stunting dinilai masih banyak kekurangan, dari lima tujuan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati No. 52 tahun 2020 yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang hebat dan bebas dari stunting, memastikan bahwa stunting menjadi program prioritas pemerintah, meningkatkan konvergensi melalui konsolidasi dan koordinasi, memperluas akses terhadap pangan padat gizi, dan

meningkatkan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pemberian layanan berkualitas tinggi, peningkatan akuntabilitas, dan pembelajaran yang dipercepat. Maka, jika dinilai berdasarkan kemampuan pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan Stunting di Kabupaten Rembang dapat dikatakan belum efektif.

Masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaa program stunting. Kendala yang dihadapi pelaksana dalam melaksanakan kebijakan Program Stunting antara lain :

- a. Belum adanya komunikasi antar instansi dengan pelaksana kebijakan untuk penyediaan pelayanan yang terpadu serta pendampingan yang rutin yang menghambat responsivitas kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menghambat perwujudan kelayakan teknis serta kelayakan politik.
- b. Sikap atau kecenderungan Ibu hamil dan risiko tinggi stunting dalam melaksanakan kegiatan yang beresiko, dan rendahnya kesadaran akan bahaya rokok

yang menghambat pencapaian tujuan.

- c. Sumber daya manusia yang belum memadai sehingga tidak sebanding dengan jangkauan wilayah kerja, menghambat responsivitas terkait kerutinan kegiatan penegak Peraturan Bupati dan kelayakan teknis kebijakan stunting.
- d. Kurangnya dukungan dan komitmen bersama bagi instansi pelaksana program, serta kemampuan dalam memberikan edukasi dan penyesuaian diri kepada masyarakat saat bersinggungan langsung dalam memberikan edukasi secara langsung.

### **Saran**

Beberapa kekurangan yang ada dalam pelaksanaan kebijakan stunting di Kabupaten Rembang, mengharuskan sebuah perubahan agar kebijakan dapat kembali mencapai tujuan awal dengan baik. Peneliti merumuskan beberapa upaya untuk memperbaiki kekurangan dengan harapan dengan upaya ini dapat membantu pelaksanaan kebijakan Stunting sehingga dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dan mencapai tujuan kebijakan.

Rekomendasi yang ditujukan sebagai solusi Evaluasi yaitu :

- a. Membuat inovasi pencegahan dan menanggulangan secara berkala dan dapat dipertanggung jawabkan seperti campaign melalui media sosial yang banyak diakses oleh remaja sebagai bentuk awal edukasi dan pemahaman mengenai stunting kepada mereka.
- b. Memberikan bantuan pangan dan fasilitas pemeriksaan kesehatan secara berkala guna pemenuhan gizi bagi masyarakat yang kurang mampu.
- c. Memberikan pelatihan khusus bagi staf atau pekerja dalam memberikan penyuluhan serta sosialisasi sebelum terjun langsung di masyarakat agar metode yang dipergunakan lebih mudah diterima oleh masyarakat.
- d. Melaksanakan uji coba kebijakan kepada wilayah kecil atau tertentu untuk melihat apakah kebijakan yang diambil tepat dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi sebelum diimplementasikan

pada sebaran luas di Kabupaten Rembang.

Solusi yang dapat dilaksanakan dengan adanya evaluasi kebijakan stunting di Kabupaten Rembang :

- a. Masyarakat harus lebih mudah menerima informasi apa pun yang disampaikan polisi, khususnya ibu-ibu yang memiliki anak kecil. Selain itu, dengan mempergunakan media sosial diharapkan kita menjadi lebih sadar akan kesehatan balita. Misalnya, kita dapat memanfaatkan media sosial untuk mencari informasi tentang cara mencegah dan menangani stunting pada balita.
- b. Dalam pencegahan stunting perlu diberikan edukasi berupa sosialisasi dan pendampingan rutin, terjadwal, dan berkala agar kebijakan yang dilaksanakan tidak berhenti ditengah jalan dan tidak memiliki dampak yang signifikan.
- c. Menambah personil tim supervisi penegakan Peraturan Bupati. Penambahan dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Puskesmas maupun kader kesehatan yang ada di setiap Desa.

- d. Membuat MOU antar instansi yang bekerjasama agar lebih memiliki komitmen dan dapat bertanggung jawab.

- e. Melaksanakan refleksi dan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi selama implementasi dan untuk menginformasikan pelatihan di masa depan.

#### **Daftar Pustaka**

- Annas, A. (2017). *Interaksi pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan* (Vol. 1). Celebes Media Perkasa.
- Arifin, K. M. R. Z. (2022). EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI WILAYAH PAMANUKAN (Studi Kasus Pada Puskesmas Pamanukan). *The World of Public Administration Journal*.
- Efferin, S., Darmadji, S. H., & Tan, Y. (2008). Metode penelitian akuntansi; mengungkap fenomena dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
- Hidayati, F., & Raharjo, B. B. (2021). Analisis Karakteristik dan Kepuasan Pasien terhadap

Pelayanan Kunjungan Bayi Lahir Stunting di Puskesmas Se-Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition*, 1(3), 346-354.

Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33-37.

Shauma, N. U., & Purbaningrum, D. G. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 200-207.